

BAB II

ONLINE BASED TRAFFICKING SEBAGAI TREND KEJAHATAN DI KAWASAN ASEAN

2.1. Perkembangan Kasus *Online Based Trafficking* di Kawasan ASEAN 2019-2022/2023

Perdagangan manusia sudah menjadi ancaman keamanan global yang telah berlangsung lama serta semakin berkembang adanya beberapa faktor yaitu ekonomi yang melemah, rendahnya wawasan terkait agama, serta moral masyarakat yang juga rendah. Maka dari itu, praktek perdagangan manusia dapat membahayakan hidup bagi masyarakat luas karena berkaitan dengan isu kemanusiaan terutama bagi masyarakat dengan pendapatan yang rendah serta kurangnya pendidikan dan pengetahuan. (Caballero, 2018). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai perdagangan manusia oleh UNODC, pada artikel 3 dari *the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dalam buku UNESCO “*Migration Studies*” juga memberikan penjelasan dan penekanan mengenai perdagangan manusia adalah adanya perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dimana dalam tindakan ini terjadi bentuk ancaman atau paksaan. Menurut Kristin Touzenis (*Programme Manager* di IOM) terdapat tiga model yang dapat menjelaskan cara-cara yang dilakukan dalam memperdagangkan manusia, antara lain: Made Bayu Permana Adhinata (Adhinata, 2012):

1. *Act*, tindakan seperti apa yang dilakukan, semisal cara rekrutmen, pengiriman, penyembunyian, serta penerimaan.
2. *Means*, terkait tindakan tersebut dilakukan yaitu bisa menggunakan ancaman.
3. *Purpose*, yaitu mengapa tindakan perdagangan bisa dilakukan dengan cara eksploitasi, prostitusi, kerja paksa, perbudakan, serta pengambilan organ tubuh manusia.

Laporan tahunan mengenai isu *human trafficking* ini dari *United States Ministry of Foreign Affairs*, dengan judul "*Trafficking in Person Report 2022*"

menyatakan bahwa makin banyaknya negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi ladang perdagangan manusia karena beberapa alasan yaitu kerentanan akan penyalahgunaan teknologi, jaringan perdagangan narkoba, masalah tata kelola negara, serta perbatasan yang memudar dan kontrol imigrasi yang lemah. (Kominfo, 2023). *Human trafficking* ini termasuk dalam pelanggaran HAM yang diakui secara internasional dan siklusnya pun juga terus marak terjadi. Lantas, isu ini di kawasan ASEAN merupakan masalah yang signifikan dan serius. Kawasan ini rentan akan perdagangan manusia terkait pekerja paksa dan eksploitasi seksual.

Namun risiko pekerja migran di Asia Tenggara selalu terjadi yaitu menjadi korban eksploitasi bahkan perdagangan manusia. Laporan dari *Global Estimates of Modern Slavery*, kasus perbudakan modern pada tahun 2021 akan mencapai angka 50 juta orang. Dari 50 juta orang ini, sekitar 28 juta orang berada di bawah kerja paksa dan 22 juta orang terperangkap dalam pernikahan paksa. ILO membagi 2 klasifikasi 2 jenis *modern slavery* yang rentan didapatkan oleh perempuan dan anak-anak, yaitu: (ILO, 2022)

1. Kerja paksa

Kasus kerja paksa ini kerap kali dijumpai pada sektor swasta yang menanda adanya eksploitasi komersial, dimana sektor ini telah menyumbang 63% dari seluruh motif kerja paksa. Diperkirakan aktivitas kerja paksa ialah kaum perempuan dan anak-anak.

2. Pernikahan paksa

Kasus pernikahan paksa sekitar 22 juta orang terjatuh dalam pernikahan paksa di tahun 2021. Tahun ini meningkat sebanyak 6,6 juta orang dibandingkan perkiraan global tahun 2016. Motif perkawinan paksa ini didasari oleh tekanan keluarga yaitu sekitar 85%. Sebanyak $\frac{2}{3}$ pernikahan paksa terjadi di Asia dan Pasifik. Dan prevalensi tertinggi berada di negara Arab yaitu 4,8 dari setiap 1.000 orang di wilayah tersebut terperangkap dalam pernikahan paksa.

Pandemi Covid-19 menjadi situasi yang mendesak bagi komunitas di seluruh dunia, termasuk negara yang terkena dampaknya. Dampak pandemi tidak hanya mengenai kesehatan saja tetapi juga berdampak buruk bagi kemerosotan

perekonomian global, mulai dari hilangnya mata pencaharian, perubahan pola imigrasi, serta jaringan sosial yang terganggu. Langkah yang belum pernah dilakukan negara di dunia untuk menurunkan jumlah kasus pandemi Covid-19, seperti pemberlakuan karantina mandiri, *lockdown*, serta *social distance* bagi seluruh masyarakat. Langkah-langkah ini dilakukan untuk meminimalisir kasus pandemi namun disisi lain malahan mendorong kejahatan secara diam-diam yaitu melalui skema online. Berikut dampak Covid-19 mampu meningkatkan risiko perdagangan manusia:

1. Menaikkan jumlah kerentanan kasus perdagangan manusia bagi para individu serta komunitas yang rentan akan kondisi perdagangan manusia.
2. Meningkatkan jumlah angka perdagangan manusia terhadap eksploitasi.

Hal di atas semakin mengerucutkan keprihatinan pada kasus perdagangan manusia, disebabkan adanya berbagai modus imigran ilegal yang terjadi di tahun 2020-2021 yang disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19. Tahun 2020-2021 menjadi tahun yang rawan terhadap peningkatan jumlah kasus kejahatan. Hal ini dikarenakan oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat yang harus terus berjalan namun terkendala situasi pandemi Covid-19. Ruang gerak yang terbatas karena keberlakuan karantina mampu meningkatkan kesulitan masyarakat dalam beraktifitas. Perluasan trend dalam isu *human trafficking* juga semakin merebak ke arah *online based trafficking* yaitu dari Data *United States National Human Trafficking* dimana trend juga semakin berubah seiring dengan berkembangnya krisis dari Januari 2020-Agustus 2022. (*United Nations*, 2023). Dengan adanya COVID 19 juga mampu menyebabkan peningkatan kasus penipuan secara digital, mulai dari penipuan percintaan dan investasi kripto. Operasi penipuan online ini telah mengubah profil korban perdagangan manusia. Kasus-kasus sebelum COVID-19 muncul melibatkan individu dengan melibatkan individu yang terbatas pada pendidikan dan biasanya bekerja pada sektor dengan upah rendah. Namun, kondisi COVID-19 justru melibatkan SDM yang berpendidikan tinggi dan melek IPTEK. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong perizinan bagi seluruh agen perekrutan malah perekrutannya menambah tantangan tata kelola

migrasi tenaga kerja sehingga semakin mempersulit pendeteksian dan pencegahan terhadap perdagangan manusia.



Gambar 2. 1. Profil Korban Berdasarkan Gender dan Umur di ASEAN

Sumber: IOM GMDAC, 2023

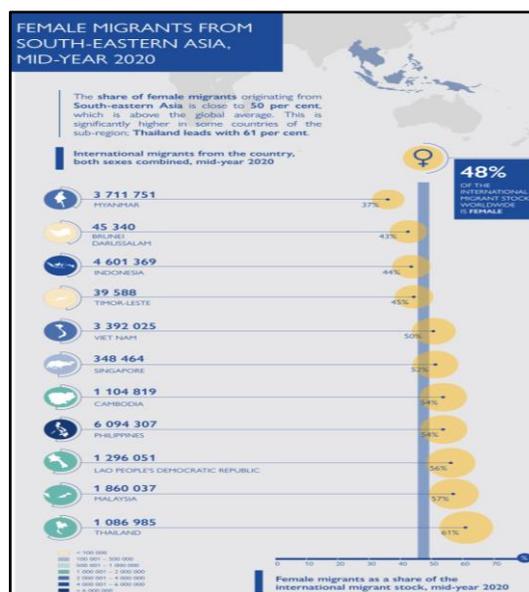
Gambar 2.1 menunjukkan data bahwa sebagian besar korban yang teridentifikasi yaitu perempuan untuk dieksploitasi secara seksual. Namun seiring berkembangnya zaman, persentase laki-laki juga menjadi lebih tinggi karena kaum ini juga rentan terhadap bentuk perdagangan manusia. Data ini juga menunjukkan bahwa saat tahun 2019, lonjakan perdagangan manusia juga semakin naik karena adanya kondisi pandemi Covid-19. Laporan IOM dan WFF tahun 2022 memperkirakan bahwa 50 juta orang menjadi korban perbudakan modern di tahun 2021. Dari jumlah ini dapat diperkirakan bahwa sekitar 27,6 juta orang berada dalam lingkaran kerja paksa serta 22 juta mengalami pernikahan paksa. (*Global Migration, 2024*)

Situasi pandemi Covid-19 ini menjadi ketakutan bagi para *stakeholder* terkait karena angka pengangguran dan pengurangan pendapatan semakin banyak terjadi di berbagai negara. Hal ini dapat terjadi bagi pekerja yang berupah rendah serta sektor pekerjaan informal, terutama pada industri garmen, pertanian peternakan, pekerjaan rumah tangga dimana kasus perdagangan manusia banyak terjadi di sektor-sektor ini.

Beberapa upaya ini dalam memberantas perdagangan manusia tentulah sangat berarti namun dengan adanya COVID 19 menyebabkan peningkatan kasus

penipuan secara digital, mulai dari penipuan percintaan dan investasi kripto. Sekitar 460 juta pengguna internet di kawasan ini memiliki kerentanan akan perdagangan manusia dimana kurangnya literasi digital dan rendahnya standar keamanan data di ASEAN menjadi hal yang rentan untuk penipuan online. Operasi penipuan online ini telah mengubah profil korban perdagangan manusia. Kasus-kasus sebelum COVID-19 muncul melibatkan individu dengan melibatkan individu yang terbatas pada pendidikan dan biasanya bekerja pada sektor dengan upah rendah. Namun, kondisi COVID-19 justru melibatkan SDM yang berpendidikan tinggi dan melek IPTEK. (Martinus & Aridati, 2024). Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong perizinan bagi seluruh agen perekrutan malah perekrutannya menambah tantangan tata kelola migrasi tenaga kerja sehingga semakin mempersulit pendeteksian dan pencegahan terhadap perdagangan manusia. (UNODC, 2020)

Kawasan Asia Tenggara ini, memiliki migrasi tenaga kerja yang sudah sangat mengakar dan menjadi fenomena yang lazim dilakukan bagi masyarakat ASEAN. Mereka yang menjadi pekerja migran memiliki peluang positif yaitu pertukaran lintas budaya antar negara dan mengangkat perekonomian negara. Sejak dulu hingga sekarang kawasan ASEAN ini memiliki tradisi perpindahan penduduk dalam skala besar dengan 11 negara ASEAN menjadi sub-wilayah penting asal tenaga kerja migran. (Ernst, 2023).



Gambar 2. 2. Jumlah Pekerja Migran Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020

Sumber: United Nations Departement of Economic and Social Affairs, 2020

Berdasarkan gambar 2.2, jumlah pekerja migran perempuan berasal dari Asia Tenggara dimana prevalensinya mencapai 50% dimana presentase ini berada di atas rata-rata secara global. Dimana Thailand menduduki posisi pertama tingkat migrasi yang mencapai 61%, dengan jumlah migrasi sebanyak 1.086.985 jiwa, peringkat kedua diduduki oleh negara Malaysia dengan prosentase yaitu 57% dengan jumlah jiwa bermigrasi yaitu 1.860.037. Kemudian di pertengahan tahun 2020 terdapat fakta dari pergerakan migrasi itu sendiri di kawasan ASEAN, yang mencakup beberapa hal yaitu:

1. Para migran melakukan mobilisasi dengan alasan yang cukup bervariasi, seperti melarikan diri sebagai jalan keluar atas kondisi lingkungan atau ketidakstabilan politik, keluarga, serta beberapa akses pendidikan atau lainnya. (McAdam, 2020).
2. Para migran dari kawasan Asia Tenggara ini menjadi korban eksploitasi dan hampir setengahnya korban di wilayah Asia dieksploitasi di kawasan Asia Tenggara. Sungguh menjadi keprihatinan yang mendalam bagi kawasan Asia Tenggara karena hampir $\frac{3}{4}$ dari seluruh korban juga berasal dari sub-kawasan Asia Tenggara. (CTDC, 2024).
3. Pekerja migran perempuan juga memiliki kerentanan terhadap eksploitasi, kerja paksa, serta pelecehan baik fisik, mental, maupun seksual. Hal ini dikarenakan karena kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal (ART, perhotelan, dan *sex business*). Data dari *Counter Trafficking Data Collaborative* (CTDC) menunjukkan sejak tahun 2002 lebih dari 85 % korban perdagangan manusia berasal dari Indonesia, Laos, dan Filipina yang korbannya diidentifikasi bergender perempuan. (McAdam, 2020)
4. Berlanjut dari fakta mengenai pekerjaan sektor informal, fakta di lapangan memang dalam pekerjaan diberikan upah rendah serta jaminan kesehatan dan keamanan yang minim. Hal ini juga disertai dengan beberapa risiko. Beberapa perlakuan non-kemusiaan yaitu pengucilan, diskriminasi sosial,

jam kerja yang tidak sesuai, aktivitas fisik yang berat, terbatasnya kebutuhan dasar serta layanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak yang didapat saat bekerja mulai eksploitasi maupun pelecehan sistematis. Contohnya yaitu di sektor perikanan Thailand, dimana fakta disana terdapat praktik ketenagakerjaan yang mengarah pada penipuan dan pemaksaan para pekerjanya Hasil survei dari ILO dimana sekitar 17% para pekerja dipaksa untuk bekerja diluar SOP dan tidak bisa pulang ke negara asalnya. (Ernst, 2023).

Diterbitkan dari Laporan tahunan oleh Kementerian Luar Negeri yang berjudul “*Trafficking in Persons Report 2022*” kawasan Asia Tenggara menjadi tempat praktik perdagangan manusia karena lemahnya penegakan hukum serta korupsi yang merajalela. Kemudian disebutkan pula bahwa, 5 dari anggota ASEAN berada dalam kondisi terburuk dalam kasus penanganan perdagangan manusia, negara ini yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini menjadi ironi dan memprihatinkan.

ASEAN menyadari pula lemahnya terkait penegakan hukum perihal pengidentifikasian pelanggaran terhadap perdagangan manusia di tingkat lokal dan kurangnya standarisasi pelaporan. Kawasan regional ini telah membentuk *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children* dan *ASEAN Declaration Against Transnational Crime*. Adapun ASEAN juga bekerjasama dengan mitra eksternal dalam upaya memperkuat keadilan, melindungi hak korban, memelopori kolaborasi regional untuk melawan perdagangan manusia. Hal ini direalisasikan melalui program *The ASEAN-Australia Counter Trafficking* yang bersinergi dalam meningkatkan praktik pengumpulan data.

2.2. Pola Decision Making ASEAN

ASEAN merupakan organisasi internasional yang terbentuk pada tahun 1967 dengan anggota-anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan tujuan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menjamin kemajuan sosial, memberikan kontribusi dalam upaya perkembangan budaya serta

menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara (Sofyan et al., 2023). Kawasan ASEAN sendiri menurut IMF (*International Monetary Fund*) total jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara diperkirakan mencapai 679, 69 juta jiwa. Angka ini menempatkan negara Indonesia sebagai penyumbang 8,09% dari total penduduk dunia yang mencapai 8,4 miliar jiwa. (Kominfo, 2023). Itu artinya dengan banyak anggota, ASEAN terdiri dari negara anggota yang menyebabkan beragam pula beragam pula kepentingan di kalangan elite pemerintah maka dari itu proses pengambilan keputusan bisa berjalan dengan kesepakatan yang nyaman bagi semua pihak serta keputusan diambil melalui konsensus bersama. Pengambilan keputusan secara konsensus ini dimungkinkan untuk setiap anggota melakukan veto usulan regional jika terdapat suatu isu yang mengancam kepentingan nasional. ASEAN tidak menitikberatkan pada suara sendiri melainkan berdasarkan eksplisit semua anggota menyetujui terkait usulan yang dibahas namun diperlukan dukungan yang baik serta cukup dalam mendukung adopsi proposal (berapapun tidak terdapat ketentuan berapa dalam). Apabila dijumpai kebuntuan maka para pemimpin ASEAN akan berusaha merundingkan isu secara bilateral. Mengingat aturan pengambilan keputusan dan penciptaan norma merupakan aspek utama dalam pengaturan kerjasama regional karena mencerminkan tingkat kendali terhadap hal yang ingin didelegasikan oleh negara anggota kepada lembaga supranasional (Feraru, 2016). Dalam merumuskan suatu kebijakan terhadap isu, terdapat 2 metode yang dipilih yaitu prinsip konsensus dengan formula ini pengambilan keputusan didasarkan dan ditekankan pada bidang ekonomi dan metode ASEAN Minus-X.

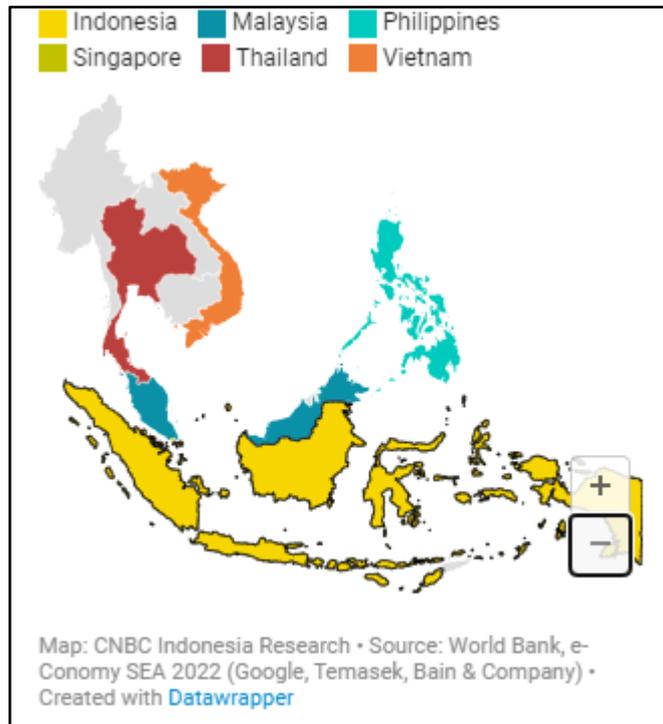
Dalam organisasi regional, perumusan keputusan sangat penting untuk mencapai hasil positif dan menawarkan solusi win-win terhadap permasalahan. Pengembangan sistem pengambilan keputusan di organisasi daerah mempunyai arti penting. ASEAN, sebagai organisasi regional yang sudah lama berdiri, harus terus memperbarui formulasi sistem pengambilan keputusannya. Hal ini penting karena dinamika politik yang berkembang antar negara.

Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus ini telah tercantum dalam Pasal 21 Piagam ASEAN tahun 2007. Konsensus inimerpkana metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan seluruh pihak yang terdiri dari

anggota ASEAN. Pengambilan keputusan dengan cara ini mampu menyalurkan segala usulan atau rancangan kebijakan regional untuk melakukan veto jika terdapat suatu isu yang mengancam kepentingan nasional. Lalu, suatu usulan atau rancangan tersebut dapat diambil sebuah keputusan jika seluruh anggota setuju dengan usulan tersebut. Konsensus digarisbawahi sebagai hal yang penting karena adanya kesepakatan yang sama antar berbagai pihak yang terlibat. Prinsip konsensus ini tentunya tidak akan tercapai dalam suatu forum terdapat satu atau lebih pihak yang tidak sepakat terhadap suatu isu. Maka dari itu, asas konsensus ini secara jelas menjunjung tinggi kesepakatan seluruh pihak untuk memenuhi seluruh kepentingan para pihak. Apabila dalam pengambilan keputusan melalui konsensus mengalami kebuntuan maka para anggota sepakat untuk membahas dan memutuskan perundingan secara bilateral. (Feraru, 2016). Keputusan konsensus ini diperoleh melalui konsultasi antar pemerintah.

Kemudian metode (Sofyan et al., 2023) pengambilan keputusan melalui rumusan ASEAN Minus-X tercantum pada Pasal 22 Piagam ASEAN tahun 2007. Proses perumusan ASEAN Minus-X ini semua pihak memiliki suara dalam penentuan keberadaan serta posisi mereka dalam pengambilan keputusan. Lalu hasilnya suatu keputusan dapat disahkan dan menjadi rencana kebijakan walaupun tidak semua anggota setuju dengan kesepakatan dalam forum. (Sofyan et al., 2023). ASEAN Minus-X ini berfokus pada pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi, maka mengantarkan suatu negara dengan perekonomian yang kuat dan stabil menjadi pihak pertama dalam melaksanakan keputusan. Kemudian selama pembahasan ini berjalan, para pihak yang tidak melaksanakan keputusan bertugas untuk mencermati, menilai, serta mengkaji terkait nilai serta keputusan apakah sejalan dan relevan dengan negaranya sehingga dapat diterapkan sebagai kebijakan negara.

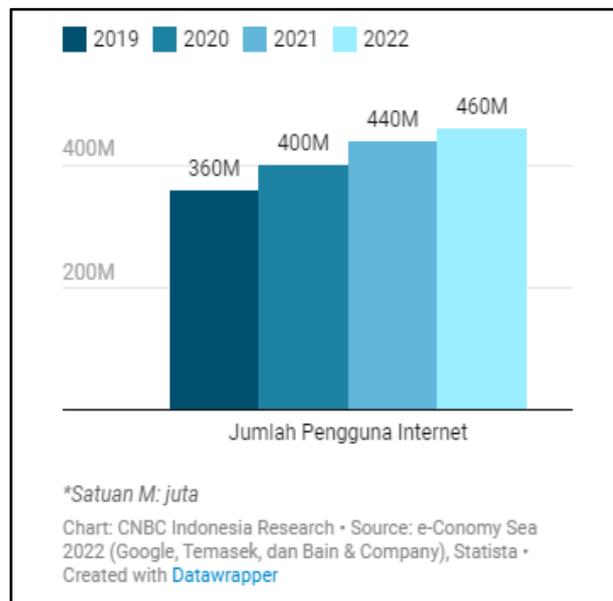
2.3. Data Pengguna Internet di ASEAN Tahun 2019-2022



Gambar 2. 3. Persebaran Internet di Kawasan ASEAN

Sumber: World Bank, 2022

Melalui gambar 2.3 di atas, peta persebaran internet dimana kawasan ASEAN menjadi kawasan serta pusat pasar internet dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Diketahui tahun 2022, pengguna internet di kawasan ini mencapai 460 juta pengguna dengan 100 juta pengguna yang bergabung dalam tiga tahun terakhir. Bahkan dari sektor *e-commerce* ASEAN menghasilkan lebih dari 130 miliar US\$ yang diproyeksikan dalam ekonomi digital regional. (Kominfo, 2023). Kawasan Asia Tenggara melebarkan sayapnya pada sektor ekonomi untuk menciptakan iklim startup digital. Kawasan ini telah diliputi oleh beberapa “*unicorn*” seperti Tokopedia, Gojek, Grab, serta Shopee yang menguasai pangsa pasar kawasan ini dan nilainya terus bertambah mencapai 1 miliar US\$. (PSSAT, 2020).



Gambar 2. 4. Jumlah Pengguna Internet Kawasan ASEAN Tahun 2019-2022

Sumber: World Bank, 2022

Berdasarkan gambar 2.4, setiap tahunnya jumlah pengguna internet di kawasan ASEAN terus bertambah yaitu di tahun 2019 sebanyak 360 juta, 2020 berjumlah 400 juta, 2021 juta, dan 2022 sebanyak 460 M. (CNBC Indonesia, 2023). Ini artinya kawasan ASEAN menjadi kawasan yang maju dalam bidang internet. Kemudian kawasan Asia Tenggara. Studi dari *Google* dan *Temasek* memperlihatkan pengguna internet melalui ponsel, laptop, dan jenis gadget lainnya di wilayah ASEAN terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah ini ditunjang oleh harga gadget yang semakin terjangkau serta layanan telekomunikasi yang mudah dan murah. Semakin tingginya layanan ponsel serta layanan internet mampu menarik minat masyarakat untuk melakukan perbelanjaan, mencari pekerjaan, berkomunikasi melalui daring atau media sosial. (CNN Indonesia, 2018). Berdasarkan laporan dari *McKinsey*, pada Desember 2019 konsumen yang berada di wilayah Asia Tenggara sangat aktif dalam penggunaan ruang digital, yaitu negara Malaysia penetrasi internet berada di angka 76%, di Vietnam yaitu 80%. Di Indonesia menurut survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet (APJII) di tahun 2018 mencapai 171, 17 juta atau setara dengan 64,8% dari total penduduk Indonesia. (PPSAT, 2020).

Menilik kembali pada masa pandemi Covid-19, perihal lowongan pekerjaan dan para *job seeker* sangat erat pula kaitannya dengan penggunaan media online, untuk itulah masyarakat kawasan ASEAN memanfaatkan media online untuk mencari pekerjaan terlebih saat situasi pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mampu mengakibatkan sektor perekonomian ASEAN menjadi lesu karena kebijakan *lockdown* serta *stay at home*, dan yang paling terdampak ialah sektor jasa. Untuk tenaga kerja di ASEAN sekitar 30 juta terindikasi sebagai pengangguran. Lemahnya sektor jasa yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan publik, pariwisata, tenaga transportasi, industri menjadi keprihatinan sendiri bagi perkembangan ekonomi ASEAN. Untuk studi kasus tenaga kerja dalam hubungannya dengan pandemi Covid-19 yaitu negara Indonesia mengalami tingkat pengangguran 9 juta tenaga kerja dengan prevalensi 28.9%. Negara Malaysia mencapai 100.000 pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Di Thailand dalam pemberitaan CNBC pada tahun 2021 menerangkan jika maskapai penerbangan yaitu Thailand mengalami pailit atau bangkrut bahkan sampai memberhentikan pekerjaannya dengan jumlah hampir 400 pekerja. Untuk Filipina sendiri mengalami kelumpuhan ekonomi karena sebanyak 428.701 pekerja diberhentikan serta beberapa pekerja lainnya diberhentikan tanpa diberikan pesangon atau bayaran. Hal serupa juga dialami negara Vietnam dimana sekitar 900.000 pekerja dipaksa berhenti karena situasi pandemi Covid-19. (Nurdyawati et al., 2021).

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang negatif terutama pada kelompok-kelompok rentan, seperti para kaum muda dan perempuan pada saat di pasar tenaga kerja. Para lulusan baru juga akan menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja dengan permintaan yang sangat minim. Dampak adanya pandemi Covid-19 benar-benar akan dirasakan oleh para pencari kerja angkatan muda karena para lowongan pekerjaan akan menawarkan gaji yang rendah. Selain itu, para pekerja migran juga mendapat pengaruh dari adanya pandemi Covid-19. Situasi yang semakin memburuk ini, mengantarkan masyarakat ASEAN untuk mencari pekerjaan di ranah online. Kurangnya pengetahuan serta literasi digital dan rendahnya standar keamanan membuat kerentanan penipuan para

pencari kerja di ranah online. Metode penipuan online ini mampu mengubah profil perdagangan manusia dengan beberapa kasus yaitu nyatanya pekerjaan berupah rendah. Berbagai langkah telah dilakukan oleh para stakeholder namun perekrutan tenaga kerja digital yang terus berkembaang menabab kesulitan untuk mendetes dan mencegah kasus perdagangan manusia. (ILO, 2022).

2.4. Faktor Pendorong Perkembangan Kasus *Online Based Trafficking*

Situasi yang kompleks, mampu membentuk skema perdagangan manusia yang semakin kompleks dan rumit. Dalam konteks, kriminalitas di kawasan ASEAN terdapat beberapa tantangan yang berbasis keamanan manusia dan hal ini menjadi semakin miris karena dijumpai kawasan ini memiliki kerentanan akan penipuan online dan menimbulkan dampak yang signifikan. Berikut paparan terkait faktor pendorong:

2.4.1. *Platform Digital*

Media sosial menjadi serta platform digital menjadi peran krusial pada kasus kejahatan di bidang online, termasuk *online based trafficking*. Data menurut Statistika yang diterbitkan oleh J. Degenhard dalam rentang tahun 2019-sekarang, jumlah pengguna internet di kawasan ASEAN yang terus bertambah. Itu artinya kawasan ASEAN mengalami kemajuan dalam teknologi digital, bisnis serta e-commerce. Penggunaan teknologi ini sebenarnya menjadi keuntungan bagi masyarakat ASEAN namun saat yang bersamaan tentunya ada batasan yang berkaitan dengan peraturan yang melindungi hak privasi di ranah digital. Bentuk evolusi platform digital juga semakin dirasakan, terdapat tipologi platform digital, yaitu (OCHR, 2023).

1. Media sosial: *Facebook, Myspace, Skype, Whatsapp*.
2. Halaman web periklanan, merujuk pada situs web umum yang terintegrasi dalam laman *google, safari*. Pada web ini biasanya yang mengarah pada individu yang memporing atau menampilkan layanan pembelian dan penjualan.
3. Halaman web yang bebas, menjadi laman yang rawan terhadap postingan situs yang dibentuk oleh sindikat atau pelaku perdagangan manusia.

Pastinya ketiga kategori ini menampilkan modus yang berbeda setiap platformnya. Sejak tahun 2020-2023 kasus perdagangan manusia di ranah *online* masih meningkat secara signifikan. Hal ini dilandasi oleh jumlah para pencari pekerjaan yang berbasis teknologi, terutama media sosial. Tentunya bagi masyarakat mencari pekerjaan di media sosial menjadi hal yang lumrah namun perlu menjadi perhatian masih menjadi fakta menyedihkan bahwa semakin banyak para sindikat perdagangan manusia. Terlebih lagi halaman web pribadi yang sering menawarkan beberapa pekerjaan yang menarik dengan tujuan merekrut korban dan mengeksploitasi.

2.4.2. Sistem Pemerintahan yang Lemah

Kawasan ASEAN menjadi kawasan yang sangat minim dari perlindungan terhadap pekerja imigran, sehingga aktivitas kriminal secara *online* menjadi ketakutan bagi negara di kawasan ASEAN. Pemerintahan yang lemah, yurisdiksi yang buruk, serta beberapa tragedi dimana otoritas diperebutkan menjadi pemicu mudahnya para sindikat atau pelaku kejahatan masuk ke suatu negara. Lantas apa saja yang menjadi penyebab dalam sistem pemerintahan yang lemah? Berikut penjelasannya:

1. Kudeta militer Myanmar, sejak Februari 202 konflik dan kekerasan di Myanmar masih saja berlanjut. Kudeta militer ini tentunya memperlemah supremasi hukum dan stabilitas keamanan di negara Myanmar. Atas hal ini, celah untuk para pelaku atau sindikat kejahatan semakin subur dimana para aktor bergerak memperluas aktivitasnya dengan melakukan kerjasama dengan para faksi serta angkatan militer. Daerah perbatasan menjadi daerah yang rawan menjadi pusat kejahatan di Myanmar karena kurangnya pengelolaan sistem hukum, pengawasan, serta akuntabilitas. Saat yang sama, banyak pula pusat *online* di beberapa negara berbasis KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Kawasan ini dicirikan dengan sistem dan aturan yang tidak jelas serta maraknya produk-produk yang terlarang secara ekonomi, perdagangan manusia, satwa liar ilegal, dan narkoba. Tahun 2019 diketahui

jumlahnya sebanyak 5.300 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di 147 negara. (OCHR, 2023).

2. Kesenjangan regulasi di Filipina. Kesenjangan ini bermula pada pengelolaan *game online* bernama POGO di Filipina. POGO ini memiliki celah yang langsung terintegrasi dengan para pelaku perjudian ilegal. Menurut data tahun 2020 oleh Departemen Keuangan Filipina (DOF), dari total 230 POGO yang berdiri di Filipina hanya sekitar 60 yang memiliki lisensi resmi dan dari jumlah 60 ini hanya 10 POGO saja yang aktif membayar pajak sesuai pernyataan dari Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR). Tahun 2022, pemerintahan Filipina telah menutup 200 POGO yang beroperasi tanpa lisensi dan izin resmi dari pemerintah. Pemerintah Filipina juga telah menyatakan bahwa POGO ini merupakan *game online* ilegal karena ada banyak kasus pelanggaran termasuk perdagangan manusia, eksploitasi pekerja imigran, serta kejahatan keuangan. (OCHR, 2023).
3. Korupsi, korupsi bisa saja dilakukan di berbagai sektor baik publik maupun swasta yang secara terang-terangan memfasilitasi perdagangan manusia. Mereka membentuk kolusi dengan apar sindikat atau pelaku perdagangan manusia dalam proses perekrutan orang dalam lingkup kejahatan. Para pejabat publik dan swasta tidak tanggung-tanggung membantu para sindikat untuk mendapat keuntungan secara material yaitu suap. Kesenjangan antara *legal framework* di level nasional menjadi masalah yang cukup berpengaruh. Keterkaitan antara pemerintahan yang korupsi. Para sindikat kejahatan menjadi mudah untuk memasuki celah jika suatu negara memiliki indikator korupsi yang cukup signifikan. (UNODC, 2021).

2.4.3. Kejahatan Terorganisir

Kasus mengenai perdagangan manusia termasuk kasus yang sulit diidentifikasi karena masih banyak negara yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan proses penuntutan atau investigasi mengenai dugaan kejahatan perdagangan manusia pada konteks kejahatan terorganisir serta operasi lintas batas negara, terutama pada era digital saat ini. Dijumpai negara saat ini kurang memiliki

pengawasan serta kapasitas yang kuat untuk memberantas kasus perdagangan manusia dalam ranah *online*. Kendala yang lain juga sering dijumpai yaitu terkait bahasa serta kerjasama lintas batas negara terutama dalam proses penyelidikan, mengadili, dan menghukum.

2.5. Aktor dan *Human Trafficking*

2.5.1. ASEAN

ASEAN (*Association of Southeast Asia Nation*) merupakan organisasi regional yang menaungi 10 negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki peranan dan tanggung jawab penting dalam mengatasi segala bentuk kejahatan baik di kawasan maupun lintas negara. ASEAN mempunyai cita-cita utama sebagai kerangka kerjasama yang sedari awal dibentuk memberi wadah keamanan bagi negara-negara anggotanya dalam perwujudan perdamaian serta netralitas di kawasan Asia Tenggara. Organisasi regional ini juga senantiasa merumuskan kebijakan dan resolusi sebagai upaya pemberantasan kasus atau kejahatan di kawasan regional. Untuk kasus perdagangan manusia, ASEAN juga telah menyuarakan keprihatinannya dalam penanggulangan kasus ini serta mengajak komunitas internasional untuk lebih tanggap terhadap berbagai kasus kejahatan perdagangan manusia. Menanggapi hal ini, ASEAN telah menerbitkan berbagai dokumen kebijakan untuk mengatasi kejahatan ini. (Khairi, 2021).

Tabel 2. 1. Dokumen ASEAN Tentang Perdagangan Manusia

No	Dokumen	Aktor	Implementasi	Address Problem	Program Selanjutnya
1	ACTIP (<i>ASEAN Plan of Action Against Trafficking</i>)	Anggota ASEAN	Fokus utama mengenai: 1. Pencegahan perdagangan orang.	Perdagangan manusia karena beberapa faktor, yaitu pemerintah	Membentuk kerja sama dalam wilayah ASEAN untuk menegakkan hukum serta memberantas

	<i>in Persons Officially Women and Children)</i>		<p>2. Perlindungan orang.</p> <p>3. Penegakan hukum dan penuntutan kejahatan perdagangan orang.</p> <p>4. Kerja sama dan koordinasi baik secara regional maupun internasional.</p>	<p>yang korupsi, kemiskinan, dorongan eksploitasi terutama pada kaum perempuan serta anak-anak.</p>	<p>TPPO dengan cara membentuk jalur komunikasi dan pembentukan badan koordinasi agar meningkatkan kerja sama di wilayah ASEAN.</p>
2	APSC (ASEAN Political-Security Community/ Pilar Politik dan Keamanan) 2015	Masyarakat ASEAN dalam kerja sama politik dan keamanan	<p>1. Menjamin serta memastikan peratifikasian deklarasi ASEAN dalam isu perdagangan manusia di tahun 2014 sehingga terwujud secara aktif dan relevan untuk memberantas perdagangan manusia.</p>	<i>Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air</i>	<p>1. Penanganan tantangan keamanan tradisional.</p> <p>2. Mendorong kemajuan HAM di Kawasan ASEAN.</p> <p>3. Peningkatan kerja sama maritim.</p>

			<p>2. Senantiasa mengimplemen tasikan UN <i>Convention Against Transnational, Transnational Organized Crimes, dan Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air.</i></p> <p>3. Memperkukuh upaya peradilan pidana serta memperkuat tindakan pencegahan untuk memerangi perdagangan manusia.</p> <p>4. Mengupayakan segala bentuk kerja sama dalam menumpas isu</p>		
--	--	--	---	--	--

			perdagangan manusia di Kawasan ASEAN.		
3	BWP (<i>Bohol TIP Work Plan</i>)	ASEAN	Mengkoordinasikan bentuk upaya di level ASEAN dan nasional secara efektif serta efisien dalam beberapa hal, yaitu mencegah TPPO, melindungi serta mendukung para korban, menjunjung hukum serta UU perdagangan manusia, dan meningkatkan kerja sama regional maupun internasional dalam melawan perdagangan manusia.	Para korban TTPO berdasarkan gender, usia, disabilitas, dan identitas sosial.	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi dokumen yang hidup yang menunjukkan ketahanan, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi tantangan baru yang dihadapi oleh ASEAN mulai dari pandemi Covid-19, bencana alam, dan bencana akibat ulah manusia, konflik dan pengungsian massal, perubahan iklim, teknologi baru. Membentuk Rencana Kerja

					<p>Multisektoral ASEAN dalam melawan TIP Tahun 2023-2028. Rencana kerja ini dirumuskan oleh SOMTC (<i>Senior Officials Meeting on Transnational Crime</i>) beserta Badan Sektoral ASEAN. Kemudian <i>draft</i> ini diadopsi tanggal 21 Agustus 2023 oleh AAMTC (Pertemuan Tingkat Menteri).</p>
4	APA (<i>ASEAN Plans of Action</i>)	Anggota ASEAN	Mengentaskan dan menanggulangi segala tantangan sehingga dengan cara yang efektif mampu secara progresif mencegah,	Para korban perdagangan manusia terutama untuk membantu para korban perdagangan orang yang teridentifikasi	1. Membentuk kampanye kesadaran masyarakat ASEAN guna memahami perdagangan manusia dan pentingnya

			<p>menekan, serta menghukum aktor perdagangan manusia (baik dari sisi korban maupun pelaku). Untuk korban diupayakan agar mendapat perlindungan dan bantuan agar mampu menciptakan kawasan yang aman serta terkoordinir.</p>	<p>sesuai dengan ACTIP dan instrumen internasional terkait lainnya, terhadap akses pelayanan kesehatan.</p>	<p>koordinasi antara lapisan masyarakat dengan media massa, NGO, swasta, tokoh masyarakat.</p> <p>2. Memperkuat kerjasama lintas batas dengan badan intelijen dan memberlakukan pertukaran data serta informasi para pelaku perdagangan manusia</p> <p>3. Mengoptimalkan sistem pengumpulan data nasional terkait mekanisme dan rute perdagangan manusia terutama pada database</p>
--	--	--	--	---	---

					regional ASEAN.
--	--	--	--	--	--------------------

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2024

2.5.2. IOM

International Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan terutama dalam perpindahan penduduk (migrasi) serta menangani tindak pidana kejahatan perdagangan manusia dalam kajian kejahatan transnasional. IOM membuka kerjasama secara luas dengan pemerintah dan nonpemerintah. Keanggotaan IOM saat ini yaitu sebanyak 174 negara, dimana 8 negara bagian bertugas sebagai pengamat di lebih dari 100 negara. Organisasi IOM ini didirikan pada tahun 1951 sebagai tanggapan terhadap konteks Eropa yang spesifik akibat adanya Perang Dunia II dimana membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan populasi yang berlebihan. (IOM, 2023). Maka, dari itu telah membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal di seluruh benua; populasi berlebihan semacam itu dianggap sebagai tantangan bagi negara dan sebagai ancaman bagi pemulihan sosial-ekonomi dan politik Eropa. Dengan demikian IOM mengentas masalah ini dengan mengidentifikasi dan merekrut para migran, memberikan informasi dan kelas bahasa, memberikan fasilitas kesehatan, menampung saat kedatangan mereka, mendorong perjanjian politik antara negara pengirim dan penerima. Adapun fokus utama IOM yaitu mengatur mekanisme proses migrasi dan pembangunannya, memfasilitasi dan melakukan penanganan terhadap migrasi paksa akibat situasi darurat dan krisis. Dalam mengatasi isu perdagangan manusia, IOM menjalin kemitraan dengan para stakeholder yaitu organisasi internasional, non pemerintah, sektor swasta sebagai respon resolusi dari perdagangan manusia mulai dari pencegahan, perlindungan, dan penuntutan secara efektif dan efisien. (Ramadhani, 2023).

IOM telah bekerja untuk memerangi perdagangan orang sejak tahun 1994. Saat ini, IOM telah membantu lebih dari 90.000 orang yang diperdagangkan. dengan memastikan kebebasan serta peluang menuju kehidupan yang lebih baik

bagi para korban. Bentuk bantuan IOM yaitu mulai dari dukungan medis dan psikososial, shelter yang aman dan nyaman, pengembangan keterampilan dan pelatihan kejuruan, reintegrasi dan pemulangan ke negara asal yang aman dan bermartabat. Dalam mengentaskan perdagangan manusia, IOM telah membentuk sistem dan proses yang baik melalui pengumpulan informasi secara langsung dari para korban perdagangan manusia. Serta senantiasa memajemen kasus perdagangan manusia dengan alat analisis IOM yaitu Basis Data Perdagangan Manusia Global IOM sebagai basis data global terbesar dan terbaik yang bersumber dari data primer korban perdagangan manusia. Berikut program IOM dalam menumpaskan kasus perdagangan manusia. (IOM, 2023).

1. Thailand

IOM di negara Thailand berfokus pada upaya pencegahan terhadap perdagangan manusia dengan melakukan kampanye sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat serta melawan migrasi gelap yang berpotensi terjadi di Thailand. Kampanye ini dilakukan dengan strategi komunikasi massal, dengan menggunakan lagu populer di Thailand yang disebarluaskan secara massal kepada masyarakat sehingga mampu mengajak dan menyadarkan. Lalu dalam strategi nasional IOM di Thailand (2017- 2020) perlawanan terhadap human trafficking menjadi area prioritas yang di mana Sebagai bidang kerja inti, IOM Thailand akan terus bermitra dengan Pemerintah Kerajaan Thailand dan aktor masyarakat sipil untuk mempromosikan pendekatan berorientasi perlindungan untuk mengidentifikasi para korban perdagangan manusia, menuntut para pelaku perdagangan manusia dan mengembangkan keterampilan hidup di antara mereka yang paling rentan. Misi ini juga akan terus mendukung para korban perdagangan manusia dengan memberikan bantuan langsung dalam bentuk layanan psikososial, konseling, medis, makanan dan barang-barang non-makanan, akomodasi, dan bantuan darurat. Mengingat kekhawatiran seputar perdagangan dan eksploitasi migran di industri pertanian dan perikanan, IOM Thailand akan berusaha untuk bekerja sama dengan pihak berwenang

terkait untuk mempromosikan migrasi yang aman dan koordinasi antar lembaga dalam menangani masalah ini (IOM Thailand, 2017).

2. Myanmar

Perdagangan wanita menjadi kasus yang banyak terjadi di Myanmar, mereka dipekerjakan sebagai budak prostitusi. Para korban berasal dari luar Myanmar. Dan pemerintah Myanmar sendiri telah melakukan penanganan untuk melakukan reintegrasi ke negara asal bagi para korban. Lalu pemerintah juga mencoba untuk mendirikan sekolah yang didirikan khusus kepada para mantan korban seks komersial paksa di Myanmar dengan tujuan agar para korban dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat sosial dan agar dapat menghilangkan perilaku *traumatic* terhadap permasalahan *human trafficking*. Itikad baik tersebut sempat mengangkat nama Myanmar sebagai Negara yang berusaha memerangi *human trafficking*. Namun dalam beberapa dekade terakhir terjadi permasalahan antar ras yang menyebabkan konflik internal di Negara tersebut hingga akhirnya Amerika Serikat menempatkan Myanmar pada daftar pelaku kejahatan 30 perdagangan manusia terburuk oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Myanmar dituduh menggunakan tentara anak di tengah kritik global atas pelanggaran hak asasi manusia oleh militer negara itu terhadap minoritas Muslim Rohingya (Yoseph, 2018). Upaya yang dilakukan IOM sendiri dalam menangani hal tersebut khususnya pekerja paksa sex komersial di Myanmar antara lain, IOM membantu pemulangan kembali para imigran gelap yang menjadi korban *human trafficking*, biasanya mereka berasal dari Thailand. Dalam kasus ini IOM bekerjasama dengan salah satu NGO yang ada di Myanmar yaitu Pusat perlindungan Hak Anak (*The Center for The Protection of Child Rights*). IOM tidak begitu banyak turun tangan karena IOM melihat bahwa pemerintah Myanmar memiliki inisiatif dalam menangani kasus *human trafficking*. Permasalahan *human trafficking* yang terjadi di negara-negara bagian asia tenggara ini memiliki motif yang beragam sehingga penanganannya juga diperlukan cara yang tentu berbeda di setiap kasusnya. Walau cara yang dilakukan oleh

IOM ini berbeda di setiap Negara, namun usaha tersebut merepresentasikan visi IOM dalam upaya nya melawan *human trafficking* dan bertujuan untuk menertibkan migrasi internasional secara manusiawi. Upaya IOM untuk mendukung visi serta misi kedutaan saat warga negaranya terjebak dalam penipuan *online*, dimana tugas IOM yaitu mengembangkan panduan teknis mengenai peaporan serta menanggapi kasus perdagangan manusia. Serta memfasilitasi setiap pelatihan mengenai respon terhadap TIP (*Trafficking in Persons*).

3. Indonesia

Di kawasan Indonesia ini, fokus utama IOM yaitu mendampingi secara langsung korban perdagangan manusia, melaksanakan penyuluhan dan pelatihan secara teknis bagi para diplomat Indonesia mengenai bagaimana identifikasi TIP dalam aktivitas penipuan *online*, menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait (LSM, pemerintah daerah, universitas, serta masyarakat melalui diskusi publik). Diterbitkan suatu film pendek berjudul “*Through the Screen*” yang mengisahkan perjalanan para korban guna meningkatkan kesadaran masyarakat (OCHR, 2023).

2.5.3. Migrant Care

Migrant Care merupakan NGO (*Non-Government Organization*), yang mana organisasi ini berbasis masyarakat sipil, didirikan tahun 2004 bergerak dalam isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia. NGO ini melakukan advokasi kebijakan, bantuan hukum, penelitian, konseling, konsultasi dan pendidikan untuk memperkuat gerakan buruh migran sebagai bagian dari gerakan sosial guna mewujudkan keadilan global. *Migrant Care* melakukan penguatan komunitas pekerja migran perempuan Indonesia untuk memperoleh manfaat yang adil, aman, dan produktif dari pekerjaan dan penghidupan serta jaminan kesehatan di era pemulihan ekonomi Indonesia, yang bertujuan agar komunitas pekerja migran perempuan dan kelompok marginal lainnya memperoleh manfaat yang adil, setara, produktif, dan berkelanjutan dari pekerjaan yang layak dan aman, serta memastikan akses mereka ke perlindungan sosial (termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan dan

asuransi kesehatan), dan untuk mendapatkan layanan migrasi yang aman dan berkualitas melalui tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang inklusif dan berkeadilan gender. (*Migrant Care*, 2024). Beberapa program yang diinisiasikan oleh *Migrant Care*:

1. Program INKLUSI

INKLUSI (Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) merupakan program kemitraan Indonesia-Australia yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan beberapa aspek, seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia serta memperkuat kontribusi masyarakat sipil dengan menjalin kemitraan bersama pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang kompleks di Indonesia. (Australia, 2023). INKLUSI memiliki tujuan yaitu mendukung agenda pemerintah Indonesia yaitu mendukung rencana pembangunan nasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta mewujudkan masyarakat inklusif. Program ini telah berjalan secara efektif di 31 provinsi dengan bekerjasama dengan mitra organisasi yaitu BAKTI, KAPAL Perempuan, Migrant Care, PEKKA, PKBI, dan SIHAB serta pemerintah Bappenas melalui Deputy Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Direktorat Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga. Program ini berlangsung dari tahun 2022-2023 sebagai kontribusi pada tujuan pembangunan kepada kelompok marginal dan kebermanfaatannya dari pembangunan. Di Indonesia, program ini memiliki target untuk membangun kesejahteraan serta meneruskan program kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender, penguatan masyarakat sipil, inklusi sosial, pengalaman dan pembelajaran berbasis masyarakat. (Inklusi, 2024).

2. Program MAMPU

Program MAMPU ini merupakan kemitraan antara pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS), adapun tujuan dari program ini yaitu meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia terhadap layanan penting serta mendukung pencapaian target tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Saat ini program MAMPU telah masuk di 5 provinsi, 8 kabupaten, dan 3 desa/kelurahan. MAMPU telah mencapai program yang berhasil dilakukan bagi masyarakat Indonesia yaitu: (*Migrant Care*, 2024)

- a. Mengadvokasi UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terutang dalam UU No. 18 Tahun 2017. Sebanyak $\frac{2}{3}$ usulan untuk mengubah UU Pekerja Migran tahun 2004 telah diintegrasikan dalam UU revisi.
 - b. Program Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran) telah terbentuk di 37 desa, program ini secara efektif mensinergikan para kelompok pekerja migran beserta keluarga mereka agar semakin berdaya untuk ikut serta dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) di 8 kabupaten Indonesia.
 - c. Tahun 2017 menjadi tahun *Migrant Care* berhasil dalam mengadvokasikan peraturan daerah mengenai Perlindungan Pekerja Migran Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri (No 15/2017) serta Peraturan Kabupaten Lombok Tengah tentang Pelayanan Satu Pintu (No 9/2017).
 - d. Menjembatani perihal pendanaan dari desa dalam Pusat Layanan Terintegrasi pada 8 kabupaten untuk program mendukung penanganan kasus.
 - e. Pemerintah desa Lombok Tengah berhasil memberikan alokasi dana desa dari Rp 5 juta sampai 60 juta sebagai dana dalam perlindungan buruh migran dan keluarga di Kabupaten Lombok Tengah.
 - f. *Migrant Care* bersama Kementerian Tenaga Kerja meluncurkan program Desmigratif (Desa Migran Produktif) di 50 kabupaten di Indonesia. Program ini memberikan pelayanan tingkat desa untuk para pekerja migran Indonesia. Di tahun 2018, Desmigratif ini dicanangkan di desa MAMPU yaitu Kuripan, Wonosobo, Banyuwangi, dan Indramayu.
3. Program Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran)
- Program Desbumi ini direalisasikan sejak tahun 2013 yang berasal dari

kemitraan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Migrant Care untuk mewujudkan model layanan pengawasan berbasis desa dalam membantu serta melindungi para buruh migran dalam mengakses informasi secara aktual dan aman serta menyediakan pemenuhan hak para pekerja migran. Program awal yang dilakukan oleh Desbumi ini yaitu pendataan kondisi pekerja migran di desa kantung para pekerja migran. (MAMPU, 2023). Desbumi ini menjadi program yang bergerak dalam perlindungan dan pendampingan buruh migran (mulai pasca maupun pra migrasi) dan para keluarga buruh untuk mendapat pendidikan dan pendampingan terhadap pilihan migrasi dan hak-hak pekerja migran, penanganan kasus dan rujukan,, pelatihan keterampilan pasca migrasi, serta pengemangan sumber endapatan alternatif yaitu membuka UMKM. Desbumi memberikan 5 pelayanan bagi buruh migran Indonesia dalam hal berikut: (*Migrant Care*, 2024).

- a. Layanan Informasi: Desbumi membentuk PPIT (Pusat Pelayanan Informasi Terpadu) memuat data-data para buruh migran serta mencakup bagaimana bermigrasi yang aman.
- b. Layanan Pengurusan Dokumen: Pelayanan ini disediakan bagi para calon para buruh migran untuk mengurus dan menerbitkan dokumen untuk bekerja di luar negeri, mulai dari KTP, KK, dan surat keterangan sebagai kebutuhan pembuatan paspor dengan baik dan benar agar terhindar dari pemalsuan dokumen dan risiko lainnya.
- c. Layanan Pemberdayaan Ekonomi: Ditujukan untuk para buruh migran purna agar mengembangkan usaha dan merealisasikan usahanya dengan pemerintah desa setempat, kabupaten, maupun pihak swasta agar memberikan pelatihan, modal, seta dukungan lainnya.
- d. Layanan Pengaduan Khusus: Desbumi membuka layanan untuk para buruh migran yang mendapat masalah di saat kerja dan menindaklanjuti masalah ini dengan para pihak terkait.
- e. Sosialisasi: Desbumi melakukan sosialisasi secara masif dan rutin kepada masyarakat mengenai prosedur dan tata cara bermigrasi yang baik dan

aman.

- f. Pendataan: Pelayanan ini dilakukan Desbumi secara reguler dan rutin guna untuk memperoleh data secara intensif dan aktual terkait para pekerja migran, termasuk pekerja yang sudah pulang kembali ke desanya.